BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis bantuan sosial yang diterima masyarakat Kampung Padaengan, pengaruh bantuan sosial terhadap tingkat ketergantungan ekonomi, serta faktor-faktor yang memengaruhi ketergantungan tersebut. Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat Kampung Padaengan menerima berbagai bentuk bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga filantropi lokal. Bantuan tersebut mencakup bantuan tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD, Kartu Anak Jakarta (KAJ), serta bantuan non-tunai seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Masingmasing program memiliki skema, tujuan, dan mekanisme distribusi yang berbeda, namun secara umum ditujukan untuk menjamin kebutuhan dasar kelompok rentan seperti rumah tangga miskin, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan anak usia sekolah. Bantuan dari lembaga filantropi lokal juga turut memperkuat jaringan perlindungan sosial di tingkat komunitas, meskipun sifatnya tidak rutin dan lebih kontekstual.

Kedua, bantuan sosial yang diterima masyarakat terbukti memberikan dampak positif dalam hal membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun, dalam jangka panjang, bantuan tersebut juga berpotensi menciptakan ketergantungan ekonomi. Sejumlah informan menyatakan bahwa mereka bergantung pada bantuan sebagai sumber utama pemasukan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketergantungan ini semakin diperkuat oleh minimnya akses terhadap kesempatan kerja produktif, lemahnya pendidikan dan keterampilan, serta ketiadaan program transisi dari bantuan menuju kemandirian. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap model bantuan karitatif yang, apabila tidak disertai program pemberdayaan, cenderung memperkuat pasivitas penerima manfaat.

Ketiga, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya keterampilan kerja, dan kondisi kesehatan anggota keluarga. Sedangkan faktor eksternal mencakup terbatasnya lapangan pekerjaan di sekitar wilayah kampung, tidak meratanya program pemberdayaan ekonomi, serta inkonsistensi kebijakan bantuan yang lebih menekankan pada aspek distribusi daripada transformasi sosial. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap bantuan sebagai "hak" yang harus diterima, bukan sebagai "stimulus sementara", turut memperkuat pola ketergantungan struktural.

Secara keseluruhan, meskipun bantuan sosial berperan penting dalam menjamin keberlangsungan hidup kelompok miskin dan rentan, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Program-program bantuan yang bersifat konsumtif dan tidak terintegrasi dengan skema pemberdayaan berkelanjutan berisiko menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jenis, pengaruh, dan faktor ketergantungan terhadap bantuan sosial di Kampung Padaengan, disusun beberapa rekomendasi kebijakan berikut untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat:

1. Integr<mark>as</mark>i Program <mark>Ban</mark>tuan Sosi<mark>al dan Pemb</mark>erdayaan E<mark>ko</mark>nomi

Pemerintah perlu mengembangkan sistem terpadu yang mengintegrasikan program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Bantuan tunai dan non-tunai sebaiknya dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan, akses modal usaha mikro, serta bimbingan kewirausahaan agar penerima manfaat dapat keluar dari ketergantungan dan memperoleh kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

2. Pemutakhiran Data Penerima dan Evaluasi Periodik

Diperlukan pembaruan data yang lebih akurat dan mekanisme evaluasi berkala terhadap status sosial ekonomi penerima manfaat. Pemutakhiran ini penting untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat dialihkan secara bertahap kepada kelompok lain yang membutuhkan, sehingga mencegah terjadinya ketergantungan jangka panjang oleh kelompok yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

3. Pengu<mark>at</mark>an Peran Pendamping Sosial

Pendamping program seperti PKH dan BLT-DD perlu diperkuat peran dan kapasitasnya, tidak hanya dalam hal administrasi dan verifikasi data, tetapi juga dalam mendampingi proses perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Pendamping sosial harus berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mendorong penerima manfaat untuk aktif membangun kemandirian, bukan sekadar menerima bantuan.

4. Peningkatan Akses terhadap Lapangan Kerja Lokal

Pemerintah daerah, bersama pelaku usaha dan komunitas lokal, perlu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja produktif di sekitar Kampung Padaengan. Strategi ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, seperti pertanian perkotaan, UMKM berbasis lebih rumah tangga, atau padat karya produktif. Hal ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka secara mandiri.

5. Edukasi Publik tentang Fungsi Bantuan Sosial

Perlu dilakukan edukasi secara sistematis kepada masyarakat bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan bersyarat. Kampanye literasi sosial ini penting untuk mengubah persepsi masyarakat yang menganggap bantuan sebagai hak permanen. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media lokal, forum warga, maupun melalui program keagamaan dan pendidikan informal di tingkat RW/RT.

6. Kemit<mark>ra</mark>an dengan Lembaga Filantropi dan Organisasi <mark>So</mark>sial

Sinergi antara pemerintah dan lembaga filantropi lokal perlu diperkuat agar program bantuan bersifat lebih berkelanjutan, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak tumpang tindih. Lembaga sosial yang selama ini bergerak dalam bidang karitas sebaiknya dilibatkan dalam skema pemberdayaan kolaboratif yang mendorong transisi dari ketergantungan menuju produktivitas.

Rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam merancang program bantuan sosial yang lebih transformatif dan berorientasi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.